

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mengambil lokasi di Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah. Merujuk pandangan Irawan (2007:4) makna penelitian kualitatif tidak terbatas pada urusan data, objek kajian, atau bahkan prosedur penelitian. Makna penelitian kualitatif sungguh tidak mudah didefinisikan, tetapi bisa dipahami ciri-ciri khasnya. Satu ciri khasnya yang sangat penting adalah makna “kebenaran” menurut penelitian kualitatif. Lebih lanjut makna kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran “intersubjektif”, bukan kebenaran “objektif”. Pengertian kebenaran intersubjektif adalah kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, seperti budaya dan sifat-sifat unik dari individu manusia. Sedangkan pendekatan studi kasus adalah penelitian yang mendalam terhadap satu unit tunggal, yang lebih menekankan keunikan partisipan dan latar belakangnya (Vredenberg: 1983 :34).

Pendekatan kasus menurut Nisbet dan Watt (1994:4) adalah “berusaha memberikan penjelasan yang jujur dan seksama tentang suatu kasus tertentu sedemikian rupa, sehingga memungkinkan kita untuk menembus apa yang tampak di permukaan dan juga untuk memeriksa kebenaran tafsiran dengan meninjau sejumlah data objektif pilihan yang sesuai”.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Riset deskriptif adalah riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter / karakteristik atau fungsi dari sesuatu hal. Menurut Neuman (1997:19) bahwa “

descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, sosial setting, or relationship". Secara deskriptif penelitian ini bertujuan menggambarkan perbandingan perilaku alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005-2008. Penelitian ini memusatkan perhatian pada APBD terutama pos-pos belanja pada APBD tahun 2005-2008, kebijakan-kebijakan tingkat kota yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan 2005-2025, APBD/ resume APBD tahun 2005-2008, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2010, Kota Pekalongan dalam angka tahun 2007, serta dokumen atas kebijakan tim yang khusus mengkoordinasi penanggulangan kemiskinan yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Selain dengan riset deskriptif, penelitian ini juga bersifat *eksploratif*, dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang permasalahan dan temuan yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan belum bisa berjalan dengan baik. Lebih lanjut dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana pemerintah Kota Pekalongan mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dalam mencapai target-target penanggulangan kemiskinan.

3.3 Metode dan Strategi Penelitian

Sedangkan teknik penelitian berkenaan dengan bagaimana data diperoleh berdasarkan sumbernya dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara. Dari wawancara dengan informan akan diperdalam dengan penelusuran informasi dengan pihak Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah (TKPKD), DPRD, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB (Bapermas & KB) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta unsur masyarakat yang mengetahui proses anggaran pihak-pihak yang berkepentingan. Alasannya informan ini mampu memberikan gambaran tentang

perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan, sedangkan dari masyarakat lebih diarahkan untuk proses partisipasi, evaluasi program dan kelembagaan.

2. Data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan studi dokumen (APBD/ resume APBD 2005-2008, SPKD, RPJPD, RPJMD, dan kebijakan-kebijakan program penanggulangan kemiskinan tingkat kota) serta dokumen dan bahan lain yang terkait dengan penelitian.

Dalam mencari, menemukan serta mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan untuk penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah; a. Observasi, pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan mencatat gejala yang tampak pada objek penelitian yang dilakukan secara langsung pada tempat kejadian. Pengamatan dilakukan secara langsung dan sistemik terhadap gejala yang terlihat selama proses penelitian, baik segi aktivitas dalam suatu kegiatan maupun proses pengambilan keputusan terhadap suatu hal. b. Wawancara, berkaitan dengan data primer melalui kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan key informan atau sumber data yang berguna mengungkap data lain yang belum diungkap. Guna melengkapi hasil kajian, peneliti juga menggunakan teknik wawancara dengan mempercayakan pihak ketiga untuk sebagian responden yang agak susah ditemui, c. Studi dokumen, berkaitan dengan data sekunder berupa pengumpulan data, dokumen, arsip yang berhubungan dengan penelitian. Studi dokumen ini memerlukan waktu yang agak lama karena disadari untuk mendapatkan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 berkaitan dengan data yang dibutuhkan memerlukan kerja tersendiri, d. Kajian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisa literatur kepustakaan yang berhubungan dengan perbandingan anggaran yang berasal dari berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak, artikel, tulisan ilmiah, jurnal yang terkait dengan penelitian.

Variabel yang menjadi objek penelitian adalah membandingkan dan menjabarkan proporsi anggaran penanggulangan kemiskinan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan pada kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2008.

Sedangkan variabel penelitian ketika akan dioperasionalkan menggunakan indikator penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5
Operasionalisasi variabel penelitian

Variabel	Indikator
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dan rencana pemerintah daerah dalam isu penanggulangan kemiskinan; RPJMD dan program penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arah strategi penanggulangan kemiskinan 2. Perumusan Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diprakarsai pemerintah 3. perumusan rencana aksi penanggulangan kemiskinan
Alokasi Anggaran dalam Anggaran Penanggulangan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi anggaran penanggulangan kemiskinan 2. Trend prosentase anggaran penanggulangan kemiskinan

3.4 Proses Penelitian

Dalam rangka mendukung pengumpulan data maka perlu dibuatkan beberapa instrumen untuk proses penelitian. Instrumen tersebut adalah pembuatan panduan wawancara, studi dokumen dan kajian kepustakaan.

1. Observasi dilakukan tanpa membuat panduan.
2. Wawancara, untuk wawancara dibuatkan panduan wawancara, panduan ini dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan wawancara, tujuannya adalah memperoleh data maupun informasi yang diperlukan secara efektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang disediakan oleh key informan. Wawancara dilakukan melalui komunikasi langsung dan mendasarkan pada fokus permasalahan dan mencari pokok

permasalahannya. Panduan dibuat secara sederhana dan mudah untuk dimengerti baik oleh key person maupun pewawancara.

3. Panduan studi dokumen, sebagai pendukung dalam studi dokumen, penulis membuat catatan panduan studi dokumen, panduan ini adalah pedoman untuk memperoleh dokumen, bahan, literatur, arsip maupun data tertentu yang terdokumentasikan. Panduan ini berupa daftar rangkuman daftar kebutuhan studi dokumen yang bisa dijadikan dasar bagi penulis dalam membuat dasar dalam menganalisa permasalahan yang ada pada lokasi penelitian.

4. Teknik pengolahan data, Setelah proses pengumpulan data telah selesai, data yang dikumpulkan selanjutnya diolah melalui tahapan;

a. Persiapan data, Persiapan ini dilakukan untuk mengecek dan menginventarisir kelengkapan dan kebenaran atas data yang dikumpulkan dan diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen,

b. Iktisar data, Bagian ini adalah merubah dari rekaman atau catatan tulisan tangan selama melakukan wawancara, observasi maupun studi dokumen. Gunanya mempermudah untuk mengklasifikasi data maupun menganalisa data. Dari transkrip disarikan isi-isi pokok penting pandangan informan terkait permasalahan dan pertanyaan yang disampaikan terkait dengan penelitian,

c. Pembuatan koding, setelah data ditranskrip, maka perlu pembacaan ulang atas isi transkrip atau catatan maupun hasil tulisan tangan yang telah dirubah. Secara pelan-pelan dan teliti, data kemudian pada bagian tertentu yang dianggap penting akan dicatat dan diambil kata kunci. Kata kunci tersebut akan dibuatkan kode tertentu,

d. Klasifikasi data, data yang telah diseleksi kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang disusun sedemikian rupa sehingga akan memudahkan untuk menjadi data yang layak untuk dianalisis,

e. Tabulasi data, data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dalam bentuk tabel ataupun grafik, sehingga akan mempermudah penulis dalam menganalisis,

f. Analisis Data, Menurut Irawan (2007:70) menukil hal yang disarankan oleh Bogden dan Biklen (1982) tentang analisis data kualitatif, bahwa analisis kualitatif adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di

lapangan dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang kesemuanya dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan penemuan kepada orang lain. Analisis data kualitatif ini menggunakan strategi yang mendasarkan pada proposisi teoritis yang menuntun pada studi kasus.

Pendekatan analisis yang dipergunakan adalah *success approximation*, yaitu pendekatan analisis yang mengaitkan data dengan teori untuk menjelaskan kesenjangan yang terjadi hingga merumuskan suatu generalisasi mengacu pada proposisi teoritis dan bertalian yang merefleksikan realitas sosial (Neuman:2003;451). Sedangkan teknis analisa perhitungan dengan mempergunakan *Public Expenditure Analysis (PEA)* yang dikembangkan oleh World Bank. Teknis analisa ini mencoba memotret trend belanja pada anggaran. Dalam penulisan ini tergambar tentang pola alokasi anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005-2008. Penulis juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pola alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Dokumen APBD 2005 sampai dengan 2008 akan menjadi target analisa, berapa dana yang telah dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan. Bagaimana fungsi perangkat daerah yang ada dalam mendukung maupun menghambat program-program penanggulangan kemiskinan. Dari faktor pendukung dan penghambat akan dikembangkan akar permasalahan yang menyebabkan kondisi dan capaian program penanggulangan kemiskinan di tahun 2005-2008. Hasil analisa sementara akan dikembangkan menjadi gambaran deskriptif tentang pola anggaran yang terjadi khususnya terkait program-program penanggulangan kemiskinan, apa masalah-masalah yang melatarbelakangi hal tersebut, apa peran perangkat daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta rencana apa yang mungkin dikembangkan oleh perangkat daerah bersangkutan dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan untuk Kota Pekalongan.

3.5 Data Penelitian

Data yang diperlukan adalah semua data yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, antara lain tentang; kebijakan penganggaran dan kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan, laporan dan dokumen yang menyangkut penganggaran baik dalam perencanaan maupun penganggaran serta laporan-laporan tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang berhubungan dengan lokasi dimana penelitian dilakukan. Sedangkan data dan informasi yang diperlukan berasal dari; 1, Informan yaitu orang-orang yang memberikan data, informasi, klarifikasi dan pandangan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Pekalongan, informan ini bisa berasal dari Pemerintah Kota Pekalongan melalui pejabat atau pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah (TKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain dari instansi pemerintahan, data dan informasi yang diperlukan juga berasal dari individu dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap program maupun isu penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan. 2. Kepustakaan, data ini bisa berupa literatur, karya ilmiah, buku, diktat, majalah dan lain-lain dan 3. Dokumen, data ini adalah sumber data berupa dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, arsip, brosur, naskah, dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen penting lainnya.

3.6 Penyimpulan Sementara

Penyimpulan sementara atau proposisi adalah bahwa perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan yang meningkat tidak langsung berhubungan dengan penurunan angka kemiskinan. Meskipun ada program penanggulangan kemiskinan yang termasuk inovatif, pemerintah Kota Pekalongan masih dihadapkan pada permasalahan tentang koordinasi dan sangat dipengaruhi program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat. Koordinasi anggaran penanggulangan kemiskinan tidak berjalan hanya melalui tim yang dibentuk oleh

kepala daerah seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

3.7 Model Penelitian

Model penelitian ini dapat yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut;

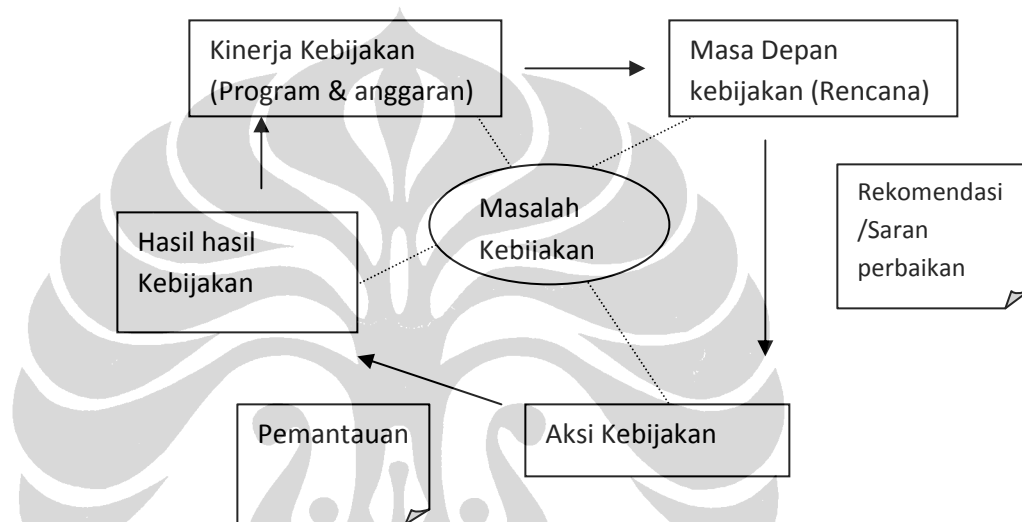


Diagram 1. Model penelitian

Model ini adalah pengembangan dari model analisa kebijakan yang berorientasi pada masalah (William Dunn:2000)¹⁸. Model penelitian ini memberikan gambaran bahwa kinerja kebijakan baik program dan anggaran penanggulangan kemiskinan dalam kurun waktu tertentu akan berpengaruh pada masa depan kebijakan, dari sini penelitian akan mengarah pada rekomendasi/ saran perbaikan akan kondisi perencanaan di masa mendatang. Langkah ini diharapkan kedepannya pasca adanya aksi kebijakn maka diperlukan pemantauan terhadap hasil-hasil kebijakan. Begitupun

¹⁸ William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, struktur kerja ini disarankan oleh walter Wallace, *The Logic of Science in Sociology* (Chicago: aldine Books, 1971), Gajah mada University Press; 2000

dengan anggaran sebagai pendukung pelaksanaan anggaran akan selalu mempunyai hubungan setelah mendapat masukan dari hasil-hasil kebijakan yang dibuat.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam membuat dan merancang penelitian ini penulis telah berupaya sebaik-baiknya. Berbagai keterbatasan penulis dalam mempelajari penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif membuat penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian tersebut, antara lain;

1. Metode, walaupun penulis mengambil metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tetapi pemahaman yang dipunyai penulis tentu akan menimbulkan persepsi yang berbeda dengan pembaca. Pendekatan deskriptif tentu akan mempengaruhi gaya bahasa dan pemahaman tersendiri bagi penulis.
2. Data dan dokumen, selain ketersediaan data yang dibutuhkan memerlukan usaha keras. Data alokasi anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2005-2008 sangat variatif terutama karena perubahan perundangan akan sedikit menghambat proses memasukan klasifikasi anggaran sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan.
3. Cakupan lokasi dan biaya, karena lokasi penelitian di Kota Pekalongan sedangkan penulis tinggal di Tangerang akan menimbulkan keterbatasan untuk melakukan pembiayaan terhadap kegiatan penelitian yang lebih optimal. Untuk itu sedapat mungkin penulis meminta bantuan kawan-kawan yang ada di Kota Pekalongan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
4. Waktu, lebih tepatnya pembagian waktu karena penulis juga bekerja dan mempunyai keluarga maka waktu untuk penulis tidak secara penuh bisa terkonsentrasikan untuk penulisan. Faktor ini penulis sadari sebagai bagian dari konsekuensi belajar. Keterbatasan waktu ini adakalanya membuat penulis harus lebih selektif untuk memfokuskan kegiatan penulisan dan bimbingan.

Penulis sadari bahwa kesibukkan yang ada membuat penulis harus sedapat mungkin mengurai dan merencanakan waktu yang tepat untuk memasukkan hasil temuan dan menuliskannya dalam tesis.

3.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari;

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam latar belakang penulisan diantaranya menggambarkan tentang perkembangan desentralisasi, perubahan kebijakan dan tujuan anggaran, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sedangkan perumusan masalah berisi pertanyaan tentang bagaimanakah perbandingan perilaku alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005 sampai tahun 2008. Untuk tujuan penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan perilaku anggaran. Dan terakhir adalah manfaat penelitian, baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan sampai kepada penulis.

Bab 2. Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang administrasi publik, definisi anggaran, tujuan dan fungsi anggaran, pola alokasi anggaran, konsep kemiskinan, pengukuran dan kriteria kemiskinan, perkembangan program penanggulangan kemiskinan dan pengertian perilaku dalam anggaran. Dalam bab ini pembahasan berisi berbagai pendapat dan literatur yang berkaitan dengan pustaka yang mendukung penelitian.

Bab 3. Metode Penelitian

Bab ini membahas berbagai hal yang berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi penelitian, proses penelitian, data penelitian, penyimpulan sementara dan model penelitian. Dalam bab ini, peneliti ingin memberikan gambaran tentang hal-hal berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan.

Bab 4. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran Kota Pekalongan seperti jumlah penduduk dan berbagai kondisi yang menyangkut kemiskinan seperti kondisi penduduk, kesehatan, kondisi kemiskinan dan kesejahteraan serta kondisi perekonomian. Gambaran tentang kota ini, diharapkan memberikan gambaran tentang kondisi dan situasi yang ada di daerah penelitian.

Bab 5. Hasil Penelitian Perbandingan Perilaku Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2005-2008

Bab ini adalah inti dari penelitian, bab ini dimulai dari gambaran tentang kebijakan perencanaan dan agenda pembangunan nasional, alokasi belanja program penanggulangan kemiskinan, data angka kemiskinan tingkat nasional, sinkronisasi perencanaan dan strategi penanggulangan kemiskinan, permasalahan penanggulangan kemiskinan serta perbandingan perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Pekalongan. Dari bab ini peneliti memberikan gambaran hasil penelitian tentang perbandingan perilaku alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2005-2008.

Bab 6. Penutup

Bab ini memberikan kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian tentang perbandingan perilaku alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2005-2008. Beberapa kesimpulan memberikan gambaran tentang perilaku anggaran yang meningkat tetapi perubahan angka kemiskinan tidak sebanding dengan peningkatan perilaku anggaran.

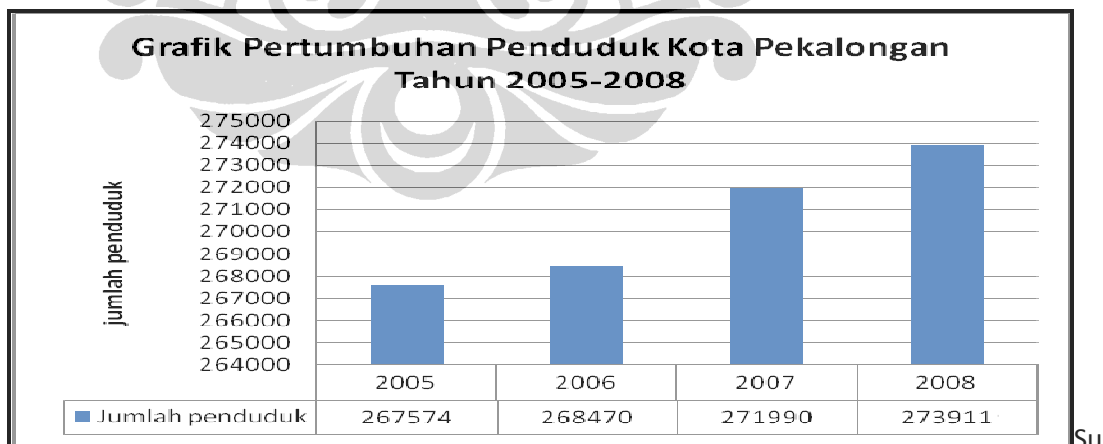
BAB 4

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tersebut menjadikan Kota Pekalongan resmi menjadi daerah yang mandiri dan berhak mengatur daerahnya sendiri.

4.1 Penduduk

Berdasarkan Data SUSENAS Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan Tahun 2008, Jumlah Penduduk Kota Pekalongan tahun 2008 adalah 273.911 Jiwa. Dibandingkan tahun 2007 adalah 271.990 Jiwa. Sehingga terjadi penambahan penduduk sebesar sebanyak 1.921 jiwa atau naik 0.70%. Sedangkan jumlah Rumah Tangga juga mengalami penambahan dari 66.899 pada tahun 2007 menjadi 67.675 pada tahun 2008 atau naik 1.15%, dengan rata-rata penduduk per Rumah Tangga adalah 4 Jiwa. Grafik 1. Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan tahun 2005-2008



sumber : Data BPS Kota Pekalongan 2008

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) Kota Pekalongan adalah sebesar 52,7, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 53 orang penduduk usia tidak produktif. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun lebih besar dari penduduk usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas.

Tabel 6. Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Pekalongan Th. 2008

No.	KECAMATAN	Kepadatan Penduduk (/km ²)		
		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1.	Pekalongan Barat	8320	8656	8691
2.	Pekalongan Timur	6604	6622	6685
3.	Pekalongan Utara	4814	4822	4849
4.	Pekalongan Selatan	4663	4648	4701
Kota Pekalongan		5933	6011	6053

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan tahun 2008.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Pekalongan Barat merupakan Kecamatan terpadat penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

4.2 Kondisi Pendidikan

Urusan pendidikan menjadi salah satu urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekalongan. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan ditjukan oleh beberapa indikator diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni pada masing jenjang pendidikan. APK pada tahun 2007 untuk SD/MI Sederajat sebesar 107,14% artinya melebihi standar ideal pemerataan pendidikan. Jenjang SMP/MTS sederajat sebesar 96,53% dan SMA/MA sederajat

sebesar 70,77%. Sedangkan pencapaian APM, untuk jenjang SD/MI sederajat pada tahun 2007 sebesar 88,01%, SMP/MTS sederajat sebesar 65,77% sedangkan SMA/MA sederajat sebesar 47,81%. Pada Tahun 2008 tingkat pendidikan penduduk Laki-laki yang berusia 10 tahun keatas di Kota Pekalongan yang terbesar adalah SD/MI (30,45%) dan jumlah terkecil adalah D3 (1,72%). Sedangkan tingkat pendidikan penduduk Perempuan berusia 10 tahun keatas yang terbesar yaitu SD/MI (28,89%), terkecil D3 (1,88%). Pada Tahun 2007 Kota Pekalongan memiliki 169 unit SD/MI sederajat dengan jumlah guru sebanyak 1.912 orang dan siswa 34.639 siswa. Sedangkan jenjang SMP/MTS sederajat memiliki 34 unit sekolah, dengan guru sebanyak 921 orang dan siswa sebanyak 15.590 orang. Sedangkan jenjang SMA/MA sederajat terdapat 26 unit sekolah dengan 551 orang guru serta siswa sebanyak 7.244 orang. Terdapat 7 perguruan tinggi, satu diantaranya adalah perguruan tinggi negeri.

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Pekalongan Umur 10 Tahun Keatas dalam Persen

No.	Tingkat Pendidikan	2008		2007		2006	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tidak/Belum pernah sekolah	2,49	6,23				
2.	Tidak/Belum Tamat SD	16,41	18,10	15,75	23,53	14,5	21,77
3.	SD/MI	30,45	28,89	28,49	28,90	32,07	27,75
4.	SLTP/MTs	23,95	20,55	22,04	19,24	21,79	19,02
5.	SLTA/MA	18,17	18,82	26,34	22,62	23,64	30,48
6.	AK/Diploma	1,72	1,88	2,52	1,90	1,62	1,55
7.	Universitas	6,82	5,54	4,87	3,81	3,89	1,66

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2008

4.3 Kondisi Kesehatan

Keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan indikator-indikator kesehatan. Pada tahun 2007, Angka Kematian Bayi (AKB) 6,8/1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu Maternal (MMR) 108,17/100.000 KH, Jumlah Balita Gizi Buruk 527 balita. Sedangkan penderita DBD pada tahun 2007 berjumlah 9,93/100.000 turun dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 12,4/100.000 penduduk sedangkan di tahun 2007 jumlah penderita TBC berjumlah 291 orang dengan

kesembuhan sebesar 83,6%. Per tahun 2007, jumlah tenaga kesehatan di Kota Pekalongan tercatat dokter umum 107 orang, Dokter spesialis 44 orang, dokter gigi 14 orang, perawat 264 orang, bidan 59 orang. Jumlah fasilitas kesehatan terutama Puskesmas tidak mengalami perubahan sejak tahun 2002 yakni 10 puskesmas, 28 Puskesmas pembantu dan 12 Puskesmas keliling. Rumah Sakit Negeri sampai tahun 2008 belum beroperasi. Sedangkan Rumah Sakit swasta terdapat 5 buah. Sedangkan kondisi kesehatan lingkungan masyarakat di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kondisi kesehatan lingkungan masyarakat Kota Pekalongan

Indikator cakupan	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Target 2010
Sarana air bersih (SAB)	97,10%	97,53%	98,17%	85%
Pemanfaatan Jamban	70,07%	70,85%	72,71%	88%
Pemanfaatan SPAL	76,70%	77,80%	78,44%	85%
Rumah sehat	76,60%	77,50%	79,64%	85%

Sumber: Dinas kesehatan Kota Pekalongan, Tahun 2007

Kondisi kesehatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Data yang menjadi target dalam program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berhubungan dengan bagaimana SKPD yang bersangkutan yakni SKPD kesehatan mampu menjabarkan indikator cakupan dalam anggaran.

4.4 Kondisi kemiskinan dan kesejahteraan

Berdasarkan data rumah tangga miskin yang dikeluarkan BPS tahun 2008, terdapat kecenderungan yang fluktuatif akan jumlah rumah tangga miskin (Kepala keluarga Miskin). Data ini menjadi dasar dalam penentuan target program-program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 9. Jumlah KK Miskin Kota Pekalongan Tahun 2005-2008

	2005	2006	2007	2008
Jumlah KK Miskin	22.902	31.461	22.683	22.639
Persentase Dengan Jumlah Penduduk	34,41%	47,11%	33,75%	33,45%

Sumber: Data BPS dan TKPKD

Terkait dengan kemiskinan, kondisi kesejahteraan sosial di Kota Pekalongan masih banyak ditemui. Walaupun berbagai upaya penanganan, pemberantasan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus dilakukan tetapi belum berhasil mengurangi jumlah PMKS secara signifikan. Tahun 2007 masih terdapat 618 orang generasi muda penyandang masalah kesejahteraan rakyat (Kesra), 135 keluarga penyandang sosial psikologi, 2.422 anak terlantar/gelandangan, 4.655 orang usia lanjut/jompo, 1.626 wanita rawan sosial, 2.049 keluarga dengan perumahan dan lingkungan tidak layak, 1.102 penyandang cacat dan 41.887 orang fakir miskin.

4.5 Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian daerah Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2006 belum sepenuhnya terlepas dari dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun sudah ada upaya pemulihan yang berdampak pada program-program penanggulangan kemiskinan tetapi pemulihan tersebut belum menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi pada masa sebelum krisis ekonomi dan moneter. Analisis indikator *produk domestik bruto regional (PDRB)*, secara umum menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan PDRB dalam rentang waktu 2001-2005. Dalam tabel dapat terlihat;

Tabel 10. PDRB Kota Pekalongan 2002-2006 (atas dasar harga berlaku/ dalam miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
1	Pertanian	229,90	234,17	260,00	255,44	247,99
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	356,58	393,45	411,09	459,20	514,90
4	Listri, Gas & Air Minum	21,82	28,01	31,22	38,28	47,44
5	Konstruksi	208,89	230,14	252,46	316,59	387,93
6	Perdagangan	431,09	461,69	494,68	558,74	636,75
7	Pengangkutan dan Komunikasi	181,20	199,95	214,14	293,51	328,27
8	Keuangan, persewaan dan jasa Perusahaan	127,52	137,38	153,26	184,77	212,06
9	Jasa-jasa	202,73	222,49	241,64	294,01	351,83
		1.763,77	1.907,34	2.058,51	2.400,56	2.727,18

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Pekalongan

Sampai tahun 2006, terjadi kecenderungan adanya peningkatan PDRB, data lanjutan adalah dengan data pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun yang sama antara tahun 2002 hingga tahun 2006 terjadi fluktuasi pertumbuhan. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.

Tabel 11. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan tahun 2002-2006

	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
Pertumbuhan Ekonomi	3,33	3,86	4,07	3,82	3,06

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Pekalongan

Dari tabel tersebut menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi, dari tahun 2002 sampai tahun 2004 terjadi kenaikan pertumbuhan tetapi di tahun 2005 dan tahun 2006 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi.

